

BAB IV KEPENTINGAN NASIONAL TURKI DALAM *OPERATION PEACE*
SPRING DI SURIAH TAHUN 2019

Dalam BAB ini, penulis akan menjelaskan isi dari penelitian ini, yaitu mengenai alasan Pemerintah Turki menerima pengungsi Suriah dan melakukan operasi militer terhadap kelompok teroris PKK di Suriah Utara tahun 2019.

A. Identitas Turki dalam Semangat Neo-Ottomanisme Terhadap Fenomena Pengungsi Suriah

Pada BAB I sebelumnya, telah dijelaskan mengenai teori Konstruktivisme yang berusaha untuk menjelaskan mengenai fenomena atau isu dalam HI yang merupakan hasil/output dari konstruksi manusia dan tergantung pada tindakan manusia itu. Menurut teori Konstruktivisme, segala fenomena HI yang terjadi di dunia ini bukanlah bersifat *given* atau terjadi mutlak/alami begitu saja, melainkan merupakan hasil dari konstruksi masing-masing aktor yang dilatarbelakangi oleh identitas yang membentuknya. Dalam hal ini, identitas Turki dilatarbelakangi oleh semangat Neo-Ottomanisme yang merupakan *grand strategy* dari pemerintah Turki untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia yang berdasarkan semangat dari kejayaan Kesultaan Turki Utsmani dulu.

Sebelumnya Turki telah mengalami fenomena pergeseran identitas dari Kesultanan Turki Utsmani, Republik Turki yang sekuler dibawah komando Mustafa Kemal Atatürk, dan rezim AK Parti dengan identitas Islam-konservatifnya. Pada BAB II sebelumnya, dijelaskan bahwa Turki mengalami masa-masa kejayaan dibawah Kesultanan Turki Utsmani dimana pada saat itu menguasai banyak

wilayah di dunia. Selain itu keberhasilannya dalam merebut Konstantinopel dari tangan Imperium Romawi, menjadi sorotan yang luar biasa terhadap perkembangan sejarah peradaban Turki Utsmani. Meskipun Kesultanan Turki Utsmani pernah mengalami masa-masa keemasan, namun Turki Utsmani juga mengalami masa-masa kemunduran identitas. Pada saat itu Kesultanan Turki Utsmani disebut oleh negara-negara Eropa sebagai “*sick man of Europe*” yang mengandung dua interpretasi yaitu, *pertama*, kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani yang terus merosot, dan *kedua*, meskipun modernitas yang dibawah oleh Turki Utsmani memiliki kultur budaya Arab dan Islam, namun mereka mengidentifikasikan diri dan orientasinya kepada negara-negara Eropa/barat (Ismail, 2011).

Setelah dibubarkannya Kesultanan Turki Utsmani pada 1924 pasca PD I oleh para kelompok pembaharu yang menamakan dirinya sebagai *Young Turks* akibat terus merosot dan melemahnya kepemimpinan sultan pada saat itu, maka identitas Turki berganti menjadi Republik Turki Sekuler yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Ataturk. Di bawah kepemimpinannya, ia melakukan reformasi besar-besaran dalam berbagai bidang, termasuk mereformasi pengaruh agama dalam pemerintahan atau ruang publik. Kebijakan yang paling fenomenal oleh Mustafa Kemal Ataturk adalah menghilangkan peran agama dari ruang publik, atau proses sekulerisasi di negara Turki. Sehingga pada masanya, agama terutama Islam terus ditekan dan diawasi pergerakannya oleh pemerintah.

Setelah masa kepemimpinannya berakhir, barulah pada masa Adnan Menderes (1950-1960), Turgut Ozal (1983-1993), Necmettin Erbakan (1996-1997), kelompok-kelompok Islam diberikan kesempatan dan kebebasan untuk

menyalurkan kepentingannya melalui partai politik. Pada masa-masa ini, kelompok Islam mulai bangkit untuk memperjuangkan kepentingannya dan berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan meskipun upaya mereka masih terhalang oleh kelompok-kelompok kemalis yang sekuler.

Namun, setelah didirikannya AK Parti di bawah kepemimpinan Erdogan yang beridentitaskan Islam pada 2001 dan kemenangan telaknya dalam pemilu 2002, menjadikan AK Parti sebagai rezim yang berkuasa dan mendominasi pemerintahan sampai saat ini. Dengan identitasnya yang berlandaskan pada Islam-konservatif, namun pada masa rezim AK Parti ini, Turki mengalami kemajuan dalam berbagai bidang terutama ekonomi. Kepercayaan masyarakat Turki kepada AK Parti sebagai partai baru, membuktikan bahwa masyarakat Turki membutuhkan perubahan secara fundamental dalam berbagai bidang terutama politik dan ekonomi.

Di bawah kepemimpinan Erdogan, Turki kembali menunjukkan eksistensinya baik di level domestik maupun internasional dengan menggunakan identitas Islam. Turki sebagai negara yang aktif dalam memainkan perannya sebagai “pemain” dalam dunia internasional, yang didasarkan pada konsepsi politik luar negeri Turki yaitu menciptakan perdamaian baik dalam level domestik maupun internasional, bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dengan berbagai negara demi mewujudkan cita-cita negara Turki. Hal tersebut termasuk dalam nilai-nilai yang terdapat pada semangat Neo-Ottomanisme yaitu peran Turki dalam politik baik di level domestik maupun internasional.

Seperti contoh diatas, dalam level domestik, Turki melalui rezim AK Parti yang dipimpin oleh Presiden Erdogan, dapat mereformasi identitas Turki dari yang sekuler di bawah pengaruh kelompok kemalisme, menjadi Turki yang kembali pada identitas Islamnya. Meskipun saat ini bentuk negara Turki adalah Republik Turki Sekuler, namun di bawah rezim AK Parti, Turki justru tampil dengan identitas keislamannya. Sedangkan dalam level internasional, Turki aktif dalam memainkan perannya sebagai pemain dalam menyebarkan pengaruhnya ke berbagai negara, salah satunya adalah keterlibatan Turki terhadap konflik Suriah.

Terlibatnya Turki dalam konflik Suriah tidak hanya berkepentingan untuk melengserkan rezim Bashar al-Assad, melainkan adanya kepentingan terhadap para pengungsi Suriah yang mencari suaka perlindungan di Turki. Berperannya Turki secara aktif dalam dunia internasional terutama dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam yang tersebar di berbagai belahan dunia, membuat Turki menjadi pemimpin bagi dunia Islam. Ditambah dengan identitas Neo-Ottomanisme, memposisikan Turki sebagai “pemimpin” dunia Islam (Yavuz, 1998). Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Presiden Erdogan yang dimuat di media online *Yenis Safak* (2018), yaitu “Turki dengan kekayaan budaya, sejarah, dan lokasi geografisnya, telah menjadi tempat yang damai bagi para beragam pemeluk agama selama berabad-abad, dan menjadi satu-satunya negara yang dapat memimpin dunia Islam”.

Salah satu bentuk perjuangan Turki sebagai pemimpin dunia Islam yaitu dibuktikan dengan keterlibatannya dalam konflik Suriah. Pemerintah Turki membuat kebijakan pintu terbuka kepada para pengungsi terutama dari Suriah yang

mencari suaka perlindungan ke Turki akibat konflik yang sedang berlangsung disana. Dengan demikian, Turki menjadi negara pertama yang memberikan suaka perlindungan kepada para pengungsi Suriah pada April 2011 (Ilgit & Davis, 2013).

Menurut Presiden Erdogan dalam pidatonya pada acara Kuala Lumpur Summit yang dilansir oleh media online Anadolu Agency (2019), menyatakan bahwa “Turki selalu beraksi atas ketidakadilan yang terjadi di dunia Islam”, sehingga hal tersebut menjadi landasan bagi pemerintah Turki untuk menerima para pengungsi dengan kebijakan pintu terbukanya. Selain itu, pernyataan Erdogan tersebut didukung oleh pernyataan Direktur Komunikasi Turki, Fahrettin Altun yang menyatakan:

“Turki menampung empat juta pengungsi dan membantu ratusan ribu pengungsi di Suriah dan Irak. Kami membantu mereka yang membutuhkan tidak hanya di wilayah kami tetapi di seluruh dunia..... Krisis kemanusiaan global membutuhkan uaya internasional berskala besar. Kami membantu dan kami memimpin..... Sudah saatnya komunitas internasional berkumpul dan mengikuti jejak Turki dalam mendukung para pengungsi di seluruh dunia”
(Anadolu Agency, 18 Desember 2019).

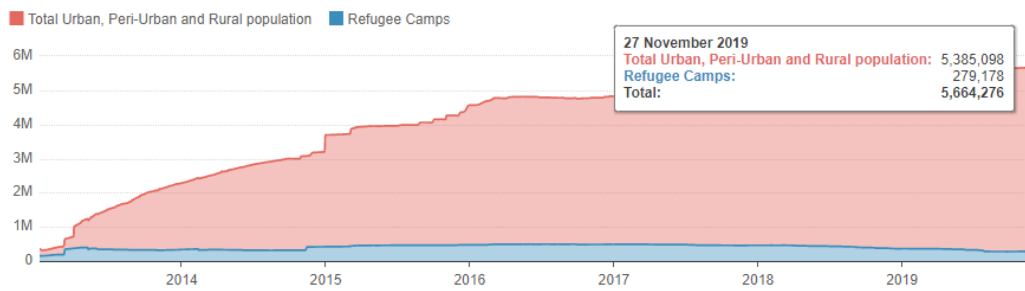
Situasi politik di Suriah yang semakin mencekam dengan adanya konflik bersenjata antara kelompok petahana yang dipimpin oleh rezim Bashar al-Assad melawan kelompok oposisi, membuat Suriah mengalami keadaan yang *chaos* di dalam negeri. Hal tersebut membuat sebagian penduduk Suriah harus mengungsi

ke negara lain terutama negara tetangganya untuk mencari suaka keamanan. Salah satu negara yang dituju oleh mereka adalah Turki.

Selama rentang waktu delapan tahun ini, Turki telah menerima pengungsi sebanyak 3,6 juta jiwa, dan memberikan fasilitas tempat tinggal serta memenuhi kebutuhan para pengungsi untuk menunjang keberlangsungan hidup mereka. Selain itu, pemerintah Turki juga berupaya untuk menciptakan zona aman di wilayah utara Suriah dengan melakukan operasi militer bernama *Operation Peace Spring* yang bertujuan salah satunya untuk mengembalikan para pengungsi Suriah ke wilayahnya dengan lingkungan yang aman dan damai.

Menurut data dari UNHCR (2019) yang telah diperbaharui pada 1 Desember 2019, total pengungsi Suriah yang tersebar di berbagai negara untuk mencari suaka perlindungan, telah mencapai angka 5.661.341 juta jiwa. Turki menjadi negara yang paling banyak menerima pengungsi dengan jumlah 3.691.333 juta jiwa per 27 November 2019, diikuti oleh Lebanon (916.113 jiwa per 30 November 2019), Jordan (654.192 jiwa per 1 Desember 2019), Iraq (234.831 jiwa per 31 Oktober 2019), Mesir (129.169 jiwa per 31 Oktober 2019), dan para pengungsi yang tersebar di wilayah negara Afrika bagian utara (35.713 jiwa per 30 November 2018).

Gambar 4. 1: Grafik Peningkatan Jumlah Pengungsi Suriah



Sumber: (UNHCR, 2019)

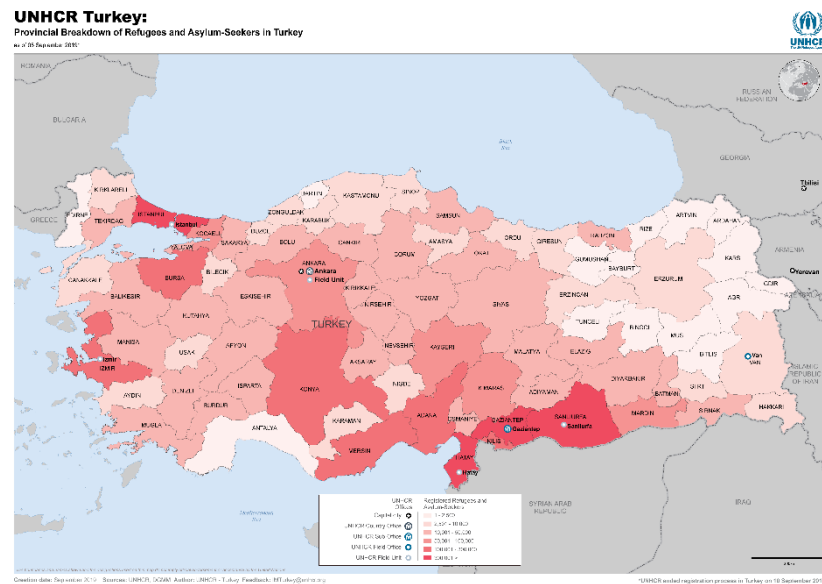
Menurut Turki, kebijakan pintu terbuka bagi para pengungsi Suriah juga bertujuan untuk mencari dukungan dari dunia Internasional dan menunjukkan bahwa krisis yang sedang terjadi di Suriah saat ini memerlukan adanya intervensi dari negara lain. Kejahatan HAM yang dilakukan oleh rezim Bashar al-Assad terhadap rakyatnya, membuat Turki ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa konflik di Suriah harus dihentikan (Luerdi, 2016).

Sebagai tuan rumah 3,6 juta pengungsi Suriah selama delapan tahun, sudah banyak kontribusi yang diberikan oleh Turki. Turki sudah memberikan USD 40 miliar untuk kemanusiaan selama krisis yang berlangsung di Suriah (Turkinesia, 27 September 2019). Pemerintah Turki telah banyak melakukan improvisasi dalam ekonominya seperti menyiapkan setiap wilayah di Turki dengan klinik dan sekolah sehingga dapat menyambut para pengungsi Suriah yang datang ke Turki. Dengan banyaknya arus pengungsi yang datang ke Turki, pemerintah Turki melakukan penataan area pengungsi sehingga tidak mengganggu stabilitas atau ketimpangan sosial masyarakat Turki. Selain itu, pemerintah juga membagi para pengungsi ke wilayah dimana terdapat sedikit penduduk Turki dan lahan yang sedikit terpakai untuk dapat digunakan oleh para pengungsi dengan membangun perkemahan

disana. Dibawah ini terdapat beberapa upaya pemerintah Turki dalam menyikapi para pengungsi Suriah, yaitu (Sumaryati, 2016):

1. Membangun camp-camp pengungsian. Di Turki saat ini telah terdapat 22 camp pengungsi dan salah satunya bertempat di Kilis. Kilis merupakan salah satu provinsi di Turki yang berbatasan langsung dengan Suriah dan merupakan camp pengungsian Suriah yang menerima penghargaan dari New York Times Magazine sebagai tempat penampungan pengungsian terbaik. Berbagai camp pengungsian yang tersebar di wilayah Turki, difasilitasi dengan berbagai fasilitas seperti dapur dan kesehatan. Selain itu, untuk membantu mengatasi permasalahan pengungsi, pemerintah Turki juga berkerjasama dengan badan PBB seperti UNHCR, WHO, dan UNICEF.

Gambar 4. 2: Peta Wilayah Persebaran Pengungsi Suriah di Turki



Sumber: Tertera

2. Para pengungsi diberikan status 'legal' oleh pemerintah Turki. Pemerintah Turki memberikan perlindungan dan tempat tinggal sementara kepada para pengungsi Suriah.
3. Pemberiaan status kewarganegaraan Turki kepada pengungsi Suriah (naturalisasi). Proses naturalisasi dapat ditempuh melalui tiga jalan menurut kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Turki, yaitu menetap di Turki dalam waktu lima tahun, melalui pernikahan dengan orang Turki, dan prosedur pengecualian pada keadaan tertentu. Menurut laporan dari Menteri Dalam Negeri Turki, Muammer Guler, pemerintah Turki telah memberikan kewarganegaraan Turki kepada para pengungsi Suriah sampai tahun 2019 ini yang berjumlah 53.099 orang (AIDA, 2018).
4. Mempersiapkan rencana jangka panjang bagi pengungsi Suriah. Seiring dengan lamanya waktu pengungsian, pemerintah Turki memberikan para pengungsi fasilitas seperti tempat tinggal, pekerjaan, dan pendidikan agar dapat memberikan manfaat baik bagi diri mereka sendiri maupun Turki. Seperti contoh, pemerintah Turki memberikan kesempatan bekerja kepada para pengungsi yang bertempat tinggal di masing-masing wilayah pengungsi Suriah berada terutama provinsi-provinsi bagian selatan Turki. Dengan demikian, pemerintah berharap dengan memberikan kesempatan kerja kepada para pengungsi Suriah tersebut, diharapkan akan meningkatkan perekonomian di provinsi-provinsi tersebut.

5. Membangun “zona aman” di wilayah Suriah bagian utara. Pada tanggal 27 September 2019 yang lalu, pemerintah turki berencana untuk menciptakan “zona aman” dan membangun 200.000 tempat tinggal— setiap desa akan dibangun 1.000 rumah, dan setiap kabupaten akan dibangun 6.000 rumah, yang mana pembangunan tersebut akan memakan biaya USD 26,6 miliar— di utara Suriah bagi para pengungsi Suriah yang ingin kembali ke tempat asalnya dengan lingkungan yang aman dan damai. Menurut rencana yang diusulkan oleh Presiden Erdogan, di dalam wilayah zona aman yang memiliki luas 30-40 kilometer tersebut, nantinya akan didirikan 140 desa dan 10 pusat distrik serta dapat menampung sampai 30.000 penduduk. Di dalam permukiman zona aman tersebut juga akan dibangun berbagai fasilitas sehingga setiap masyarakat Suriah yang tinggal disana dapat menjalani kehidupan normalnya dan kebutuhannya dapat terpenuhi.

Setiap RT di desa yang tinggal di wilayah permukiman zona aman, akan diberikan tanah pertanian sendiri dan setiap area pemukiman akan memiliki 11 masjid, 9 sekolah, 5 pusat kegiatan pemuda, 2 ruang olahraga, dan 8 distrik akan dibangun klinik kesehatan rawat inap. Dibangunnya fasilitas tersebut sebagai bentuk pengakomodasi kebutuhan masyarakat Suriah yang bertempat tinggal di wilayah tersebut (Turkinesia, 28 September 2019).

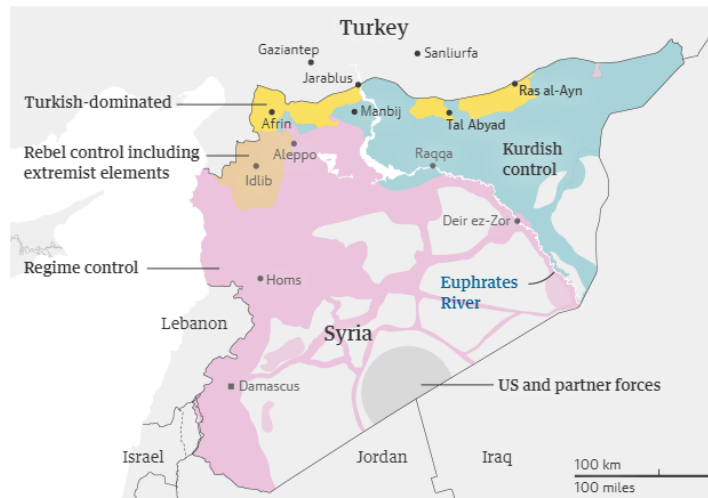
Dalam mewujudkan rencana pembangunan di zona aman tersebut, pemerintah Turki sebelumnya telah meluncurkan operasi militer yaitu *Operation*

Euphrates Shield pada 2016 di wilayah provinsi barat Eufkrat (al-Bab dan Jarablus), dan *Operation Olive Branch* pada 2018 di provinsi Afrin (Turkinesia, 28 September 2019). Pada 2019 ini tepatnya 9 Oktober, Turki melancarkan operasi militer lagi yang disebut dengan *Operation Peace Spring* di wilayah utara Suriah. Ketiga operasi militer tersebut mempunyai dua tujuan yang sama yaitu mengatasi kelompok terorisme baik ISIS maupun YPG/PKK dan menciptakan zona aman di Suriah bagi para pengungsi Suriah (Turkinesia, 11 Oktober 2019). Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Kepala Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Turki, Volkan Bozkir yang menyatakan bahwa:

“Operation Peace Spring bertujuan untuk membentuk zona aman dan memusnahkan kelompok-kelompok teror di Suriah utara.... Operasi ini juga bertujuan untuk mengembalikan warga Suriah, yang telah kita tampung sejak lama, dengan memastikan lingkungan yang cocok di kawasan itu” (Anadolu Agency, 10 Oktober 2019).

Sampai pada 9 Desember 2019, *Operation Peace Spring* telah membebaskan 4.000 km² wilayah di utara Suriah dari para kelompok teroris baik ISIS maupun PKK yang sebelumnya menempati daerah tersebut (Anadolu Agency, 9 Desember 2019). Dalam pidatonya Presiden Erdogan di *Global Refugee Forum*, Genewa, ia mengatakan bahwa sebanyak 371.000 ribu pengungsi Suriah yang sudah meninggalkan Turki dan menempati zona aman di wilayah Ras al-Ayn dan Tal Abyad (The Guardian, 2019).

Gambar 4. 3: Peta Wilayah Zona Aman di Utara Suriah



Guardian graphic. Source: Institute for the Study of War

Sumber: Tertera

B. *Operation Peace Spring* Terhadap Kelompok PKK

Kepentingan keamanan nasional Turki dianggap sebagai perlindungan integritas teritorial dimana mewujudkan stabilitas keamanan menjadi tujuan yang ingin diraih. Strategi kebijakan luar negeri Turki terhadap konflik Suriah, didasarkan pada masalah keamanan dan stabilitas domestik yang terjadi di Turki. Pada hal ini, masalah keamanan dan stabilitas Turki dipengaruhi dengan munculnya kelompok PKK yang semakin memperluas pengaruh dan aksi kejahatannya sehingga mengancam tatanan pemerintah domestik Turki.

Bagi pemerintah Turki, stabilitas domestik dan keamanan menjadi syarat dalam keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Erdogan menyatakan bahwa Turki telah mencapai serangkaian prestasi dalam bidang ekonomi maupun militer selama lebih dari satu dekade, dan pemerintah akan terus berjuang untuk melanjutkan pencapaian baik tersebut. Pemerintah Turki meyakini

bahwa stabilitas domestik dan terciptanya keamanan sebagai faktor dalam meningkatkan dan mempertahankan pencapaian itu (Luerdi, 2018).

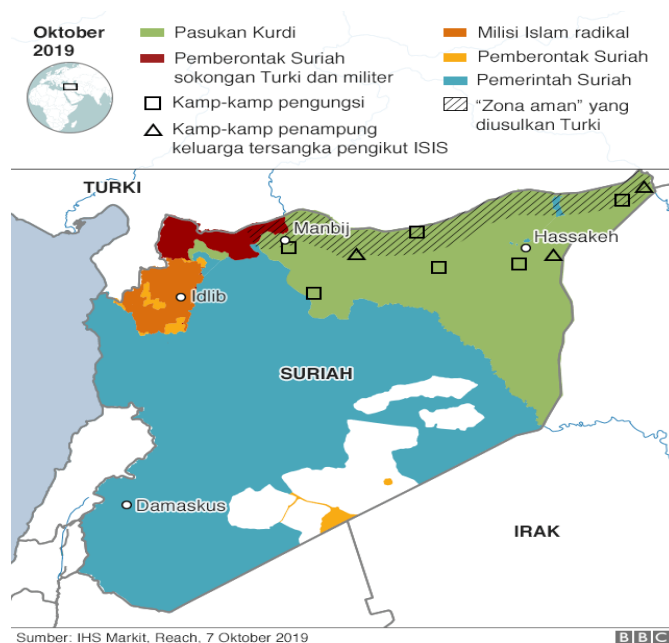
Namun saat ini, dengan munculnya kelompok PKK di Turki, membuat stabilitas domestik dan keamanan Turki menjadi terganggu. Hal tersebut membuat pemerintah Turki memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan operasi militer yang disebut sebagai *Operation Peace Spring*. Kepentingan nasional Turki untuk melakukan operasi militer di wilayah utara Suriah, sejalan dengan konsep kepentingan nasional primer yang diutarakan oleh Hans J. Morgenthau yaitu kemampuan suatu negara untuk melindungi identitas fisik, budaya, politik, dan keamanan negara tersebut dari gangguan atau ancaman negara lain (Bakry, 2017). Maksudnya adalah, dalam hal ini suatu negara harus dan wajib mempertahankan integritas wilayah (identitas fisik), rezim ekonomi-politik (identitas politik) dengan berbagai macam ideologinya, dan memelihara norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan yang terdapat di dalam suatu negara-bangsa (identitas budaya) (Mas'ood, 1990).

Semenjak munculnya kelompok PKK pada 1984 yang dipimpin oleh Abdullah Ocalan dan membawa misi untuk memisahkan diri dari Turki serta membuat wilayah otonomi sendiri bagi etnis Kurdi, kelompok tersebut dicap sebagai kelompok teroris karena berbagai aksinya yang bertanggung jawab atas kematian lebih dari 40.000 orang. Konflik yang terjadi di Suriah digunakan oleh kelompok PKK sebagai momentum untuk memasuki wilayah utara Suriah dan membangun basis pemberontakan yang dibantu oleh YPD—kelompok etnis Kurdi yang berafiliasi dengan PKK. Keterlibatan pemerintah Suriah terhadap kelompok

tersebut dengan memberikan bantuan berupa akses senjata yang lengkap, untuk membantu rezim menghadapi kelompok oposisi (Understanding War, 2012).

Kelompok PKK terus menerus memperjuangkan kepentingan politiknya melalui perjuangan persenjataan dan memberikan pengaruhnya kepada kelompok PYD di Suriah. PKK mendapatkan keuntungan akibat terjadinya konflik di Suriah yaitu PKK dapat mengkampanyekan tujuannya untuk menghadapi Turki melalui bantuan kelompok PYD, dan disisi lain PKK akan membantu kelompok PYD mempromosikan dirinya di Suriah. Dengan dikuasainya wilayah-wilayah kelompok PYD di Suriah oleh PKK, maka akan meningkatkan kekuatan politik dan militer dari kelompok tersebut. Pemerintah Turki menuding Suriah dikarenakan upayanya untuk mendestabilisasi keamanan Turki dengan menyerahkan daerah-daerah yang ditempati etnis Kurdi di Suriah dibawah kontrol PKK (Understanding War, 2012).

Gambar 4. 4: Persebaran Kekuatan dalam Konflik Suriah



Sumber: Tertera

Selain itu, Suriah juga memanfaatkan kelompok tersebut untuk menyerang Turki sebagai bentuk balasan kerana Turki mendukung kelompok oposisi di Suriah. Sehingga hal tersebut membuat pemerintah Turki menganggap bahwa krisis yang terjadi di Suriah secara tidak langsung memberikan ancaman keamanan terhadap stabilitas domestik Turki. Selain secara geografis letak Turki berdekatan dengan Suriah, terlebih dengan munculnya kelompok PKK yang bekerjasama dengan kelompok PYD di Suriah dan menguasai wilayah utara Suriah, membuat persepsi ancaman yang dimiliki oleh Turki semakin menguat.

Dengan dikuasainya wilayah utara Suriah, PKK mendapatkan keuntungan untuk bisa merencanakan dan melakukan berbagai aksi kejahatannya di Turki, serta melakukan latihan militer tanpa adanya kekhawatiran terhadap pemerintah Suriah. Aksi yang dilakukan oleh kelompok PKK di Turki setelah keterlibatan dalam konflik Suriah salah satunya yaitu meningkatnya jumlah serangan bom di Turki. Pada 12 Agustus 2012, terjadi serangan bom di kota Gaziantep, Turki yang merupakan tempat bagi para pengungsi Suriah. Selain itu, selama tahun 2013, telah terjadi lebih dari 40 peristiwa pengeboman yang termasuk didalamnya bom bunuh diri (Luerdi, 2016).

Untuk mengatasi permasalahan keamanan dan stabilitas internal Turki, maka Pemerintah Turki memutuskan untuk melakukan *Operation Peace Spring*. Operasi tersebut dilaksanakan pada 9 Oktober 2019 yang lalu, tidak hanya bertujuan untuk membangun zona aman di wilayah utara Suriah, melainkan juga untuk menumpas kelompok teroris baik PKK/PYD maupun ISIS yang telah mengancam keamanan Turki dan penduduk Suriah. Operasi militer tersebut telah berhasil melumpuhkan

sebanyak 550 teroris PKK/YPD di wilayah utara Suriah (Anadolu Agency, 14 Oktober 2019).

Pemberian nama pada *Operation Peace Spring* atau Operasi Mata Air Perdamaian, menurut Presiden Erdogan berdasarkan kondisi geografis antara Suriah dan Turki dimana wilayah tersebut penuh dengan mata air. Dalam operasi militer tersebut, Pemerintah Turki tidak berniat untuk menduduki dan menguasai wilayah utara Suriah, serta menyakiti penduduk sipil yang ada disana. Akan tetapi, Pemerintah Turki berfokus untuk membangun perdamaian di Suriah dan menghilangkan ancaman dari kelompok teroris yang mendiami wilayah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan perkataan Presiden Erdogan dalam pertemuan para petinggi AK Parti di Ankara:

“Ada warga yang ingin kembali ke negara mereka sendiri namun mereka tak memiliki rumah untuk ditinggali. Kami berencana membangun pemukiman baru untuk satu juta orang.... Kami tak terima warga sipil tersakiti dalam operasi ini. Kami hanya melawan mereka yang menggunakan senjata untuk melawan, menyerang dan menjebak kami. Saudara Suriah kami tak perlu takut atau khawatir (Anadolu Agency, 14 Oktober 2019).”